Laporan Kegiatan Initiative
”Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia”

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Senin, 28 Juli 2025
Narasumber	1. Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) 2. Dr. Nurjaeni (Direktur Sistem Pemenuhan Nutrisi, Badan Gizi Nasional) 3. Prof.Dr.drg. Sandra Fikawati, M.P.H. (Guru Besar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat)
Moderator	Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Senin, 28 Juli 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengadakan diseminasi bidang sosial dengan tema di atas yang dibawakan oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, selaku Peneliti Bidang Sosial TII. Di awal Natasya menyampaikan temuan kajiannya bahwa Ibu hamil mengalami kurang gizi kronis bahkan masih kurang, status gizi indonesia (2024) menunjukkan bahwa stunting ada karena masih tinggi ketimpangan ekonomi. Perjalanan kebijakan penanganan stunting di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak periode 2018 hingga 2024. Pada masa ini, sasaran utama intervensi difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–23 bulan, sesuai dengan konsep 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Selain itu, intervensi juga diperluas untuk mencakup remaja dan perempuan usia subur. Upaya ini membuahkan hasil, dengan penurunan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 19,8 persen pada tahun 2024. Berbagai program turut berkontribusi, seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, promosi pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan kesehatan yang lebih luas, serta penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Meski begitu, masih ada tantangan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya skrining anemia pada remaja dan calon pengantin, rendahnya cakupan pemeriksaan antenatal, lemahnya pengawasan konsumsi TTD, serta terhambatnya pembangunan ketahanan pangan keluarga.

Memasuki tahun 2025, sasaran kebijakan diperluas tidak hanya pada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga anak usia di bawah lima tahun serta kelompok ibu hamil dan balita dengan masalah gizi. Upaya pemerintah terus berlanjut dengan tersedianya 1.785 Satuan Pelayanan Pencegahan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Hingga 12 Juni 2025, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 4,89 juta penerima dengan realisasi belanja Bantuan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp4,4 triliun, meski masih dalam proses penyusunan SOP dan pengesahan Peraturan Presiden. Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi, seperti belum sepenuhnya terintegrasinya program MBG dengan edukasi gizi, tidak dilakukannya pengukuran status gizi, serta masih lemahnya jaminan kebersihan, keamanan, dan nutrisi. Selain itu, keterlibatan semua aktor dalam memastikan keberlanjutan program masih belum maksimal, disertai risiko munculnya sampah makanan yang dapat menjadi masalah baru.

Permasalahan implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif kesehatan masyarakat menunjukkan pentingnya penguatan empat standar utama pemenuhan gizi, pemenuhan kalori, kebersihan makanan, dan keamanan makanan. Standar ini wajib dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup seluruh tahapan mulai dari pra-produksi, proses memasak, pemosrisan, pengemasan, hingga distribusi.

Dalam aspek pemenuhan gizi, diperlukan standarisasi kemampuan penyusunan menu yang benar-benar bernutrisi. Menu yang disajikan tidak boleh menggunakan makanan ultra proses, harus memenuhi Angka Kecukupan Gizi, serta memastikan keseimbangan nutrisi. Sementara itu, pemenuhan kalori harus disesuaikan dengan status gizi penerima. Hal ini mencakup pengendalian penggunaan gula, garam, dan lemak agar tidak berlebihan maupun kekurangan, serta perlunya pengkajian lebih lanjut terkait produk susu yang ditambahkan dalam menu.
Dari sisi kebersihan makanan, SPPG diwajibkan mendapatkan sertifikasi pelatihan bagi penjamah makanan dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Mandat ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang menekankan pentingnya dukungan pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan ketat terhadap keamanan pangan.

Aspek terakhir adalah keamanan makanan, yang memerlukan optimalisasi dan pemerataan pelatihan serta simulasi bagi tim SPPG. Tim pengawas keamanan harus mampu memahami standar operasional prosedur (SOP), mendokumentasikan evaluasi kualitas makanan, serta memanfaatkan sistem monitoring seperti Tauwas Care. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga menjamin kualitas, keamanan, dan kebersihannya bagi masyarakat. Analisis kesesuaian implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menurunkan angka stunting, khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menunjukkan adanya capaian penting, namun juga masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan kerangka konseptual UNICEF mengenai gizi ibu dan anak (2021), terdapat tiga aspek utama yang memengaruhi keberhasilan program ini, yaitu tata kelola, norma, dan sumber daya.

Dari sisi tata kelola, sudah tersedia peraturan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan MBG. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan catatan penting, terutama terkait kebutuhan sosialisasi yang merata, percepatan pengesahan Peraturan Presiden, dan penyusunan pedoman khusus yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Pada aspek norma, tantangan masih cukup besar. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi masih rendah. Pemanfaatan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan gizi juga belum optimal, sehingga perlu pendekatan yang mempertimbangkan budaya dan norma lokal agar lebih efektif. Sementara itu, dari sisi sumber daya, implementasi berjalan secara parsial. Beberapa kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur dan anggaran, minimnya akses pelatihan bagi penjamah makanan, serta belum maksimalnya pemberdayaan petani lokal. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan air bersih dan sanitasi yang layak, yang berpengaruh pada kualitas produksi makanan untuk mendukung program MBG.

Dengan demikian, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, keberhasilan implementasi MBG dalam menurunkan stunting sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sumber daya di tingkat lokal. Di akhir, secara umum Natasya mencampaikan tiga rekomendasi. Pertama adalah penunjukkan perwakilan BGN di daerah, integrasi BGN dengan program yang sudah ada, dan pemberdayaan UMKM serta petani. Selanjutnya, kajian ini ditanggapi oleh Prof. Sandra Fikawati. Ia mengawali dengan memberikan apresiasi, menyampaikan bahwa kajian tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Menurutnya, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya penting dilihat dari sisi keberlangsungannya, tetapi juga dari cakupan jangka panjang yang harus mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Prof. Sandra juga menyoroti adanya menu susu dalam program MBG. Ia menilai bahwa keberadaan susu merupakan hal positif, mengingat kandungan nutrisinya yang bermanfaat, namun tetap perlu kajian lebih lanjut agar konsumsinya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan gizi penerima.

Lebih jauh, optimalisasi tata kelola MBG menjadi kunci utama agar program ini tidak sekadar hadir secara seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak yang tinggi dan adil antarwilayah. Salah satu langkah krusial adalah pemetaan wilayah prioritas berbasis data spasial. Pemanfaatan data stunting, tingkat kemiskinan, dan ketahanan pangan daerah — misalnya dari ePPGBM maupun FSVA, menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi daerah dengan risiko gizi buruk yang paling tinggi. Dengan cara ini, distribusi sumber daya dapat dilakukan lebih tepat sasaran melalui *affirmative action*, khususnya diarahkan pada wilayah-wilayah tertinggal atau daerah dengan prevalensi stunting yang lebih berat.

Namun, tata kelola yang baik tidak bisa hanya berhenti pada aspek distribusi. Keberhasilan program MBG juga sangat ditentukan oleh integrasi multisektor dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak cukup jika hanya mengandalkan sektor kesehatan, karena faktor gizi dan ketahanan pangan bersifat lintas dimensi. Oleh sebab itu, berbagai sektor lain seperti pendidikan, pertanian, dan perlindungan sosial harus turut dilibatkan secara aktif dalam perencanaan maupun implementasi. Untuk memastikan sinergi tersebut berjalan, perlu dibentuk task force MBG lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten. Tim inilah yang akan memastikan program berjalan terpadu, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

Dengan pendekatan berbasis data, integrasi lintas sektor, dan tata kelola yang kuat, program MBG berpotensi besar tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan gizi nasional dalam jangka panjang.

Menanggapi kajian tersebut, Nurjaeni menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak alergi terhadap kritik. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan perlu bersifat objektif dan didukung oleh data yang komprehensif. Menurutnya, banyak masukan yang diterima justru kurang

tepat karena dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan atau informasi yang tidak lengkap. Untuk menghasilkan masukan yang benar-benar bermanfaat, Nurjaeni menilai penting dilakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data dari seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan agar aspirasi tidak hanya bersandar pada informasi media, mengingat media sering kali bersifat parsial. Nurjaeni menambahkan bahwa BGN sendiri sudah beranggotakan ratusan ahli, sehingga program yang dijalankan tidak mungkin disusun secara sembarangan.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Fika menutup dengan menekankan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah proyek ambisius semata, melainkan bagian dari program pembangunan yang membutuhkan dukungan kolektif dari seluruh pihak. Ia mengajak agar publik memandang MBG sebagai upaya strategis yang harus diperkuat, bukan sekadar kebijakan populis.

Senada dengan itu, Natasya mengingatkan bahwa MBG tidak boleh berhenti pada pendekatan konsumtif yang hanya berfokus pada pembagian makanan gratis. Menurutnya, agar program ini benar-benar transformatif, perlu adanya perbaikan tata kelola, evaluasi berkala, serta edukasi gizi yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, rangkaian tanggapan ini memperlihatkan bahwa meski program MBG telah menunjukkan potensi besar dalam menurunkan angka stunting, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keterbukaan terhadap kritik berbasis data, serta kesadaran bersama bahwa program ini adalah bagian dari pembangunan jangka panjang, bukan sekadar proyek sesaat.